

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan pembangunan nasional di Indonesia adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menata kehidupan yang layak untuk menciptakan kesejahteraan (Misdawita, 2013). Kesejahteraan umum merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial penduduk negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial dan ekonominya (BPS dalam Jundi, 2014).

Kesejahteraan umum di Indonesia dapat digambarkan salah satunya berdasarkan tingkat kemiskinan. Terdapat hubungan negatif antara kesejahteraan umum dengan tingkat kemiskinan di Indonesia, semakin rendah tingkat kemiskinan menggambarkan semakin tinggi kesejahteraan penduduk di Indonesia. Indikator utama keberhasilan pembangunan salah satunya adalah menurunnya jumlah penduduk miskin di Indonesia (Jundi, 2014).

Kemiskinan merupakan masalah yang menyangkut banyak aspek karena berkaitan dengan pendapatan yang rendah, buta huruf, derajat kesehatan yang rendah, dan ketidaksamaan derajat antar jenis kelamin, serta buruknya lingkungan hidup. Salah satu penyebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, tingkat kesehatan, dan pendidikan yang dapat diterima. Disamping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan

lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai. Mengatasi masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara terpisah dari masalah-masalah pengangguran, pendidikan, kesehatan, dan masalah-masalah lain yang secara eksplisit berkaitan erat dengan masalah kemiskinan (Bank Dunia dalam Harlik, 2013).

Tinjauan kemiskinan dari dimensi ekonomi ini diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk mendapatkan mata pencaharian yang mapan dan memberikan penghasilan yang layak untuk menunjang hidupnya secara berkesinambungan yang terlihat dari rendahnya gizi makanan, tingkat kesehatan yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah, pakaian yang tidak layak, dan sebagainya. Definisi tentang kemiskinan telah mengalami perluasan, seiring dengan semakin kompleksnya faktor penyebab, indikator, maupun permasalahan lainnya yang melingkupinya. Kemiskinan tidak lagi hanya dianggap sebagai dimensi ekonomi melainkan telah meluas hingga kedimensi sosial, kesehatan, pendidikan, dan politik. Kemiskinan dalam arti luas dapat diartikan sebagai keterbatasan yang disandang oleh seseorang, sebuah keluarga, sebuah komunitas, atau bahkan sebuah Negara yang menyebabkan terjadinya ketidaknyamanan dalam kehidupan, terancamnya penegakan hak dan keadilan, terancamnya posisi tawar dalam pergaulan dunia, dan pada jangka yang lebih panjang dapat mengakibatkan hilangnya generasi, serta suramnya masa depan Bangsa dan Negara (Budhi, 2013).

Masalah yang selalu dihadapi oleh manusia yaitu kemiskinan. Implikasi permasalahan kemiskinan dapat melibatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia dan kemiskinan itu sama tuanya dengan usia kemanusiaan itu sendiri. Definisi kemiskinan menurut orang yang tergolong miskin yaitu merupakan sesuatu yang nyata ada dalam kehidupan mereka sehari-hari, karena mereka itu merasakan dan menjalani sendiri bagaimana mereka hidup dalam kemiskinan (Suliswanto, 2010).

Kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang masih sulit terpecahkan hampir di setiap daerah di Indonesia. Kebijakan-kebijakan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan masih terus menerus dikaji sampai saat ini. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang tingkat kemiskinannya masih cukup tinggi sehingga perlu diketahui faktor apa yang mendasarinya dan seberapa besar pengaruh faktor tersebut sehingga bisa dicari solusi untuk menurunkan tingkat kemiskinan tersebut (Susanti, 2013).

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang tergolong miskin di Provinsi Jawa Barat cukup tinggi. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang sangat tinggi menyebabkan tingkat masyarakat miskin di wilayah tersebut semakin banyak. Tingkat kemiskinan di Jawa Barat merupakan tingkat kemiskinan penduduk Jawa Barat secara agregat yang memiliki rata-rata pengeluaran perbulan di bawah garis kemiskinan yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistika. Menurut hasil survey Badan Pusat Statistika tercatat jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015 merupakan jumlah penduduk miskin tertinggi di seluruh provinsi

di Indonesia setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah yaitu mencapai 4.186.110 penduduk dan presentase tingkat kemiskinan di Jawa Barat mencapai 8,77%.

Tabel 1.1
Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2015

Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	Tingkat Kemiskinan (%)
Aceh	841,31	16,43
Sumatra Utara	1.452,55	10,27
Sumatra Barat	376,51	7,14
Riau	501,59	7,67
Jambi	290,81	8,37
Sumatra Selatan	1.096,50	13,39
Bengkulu	325,60	17,03
Lampung	1.139,78	13,86
Kepulauan Bangka Belitung	71,07	5,04
Kepulauan Riau	119,14	5,84
DKI Jakarta	385,84	3,75
Jawa Barat	4.168,11	8,77
Jawa Tengah	4.493,75	13,19
DI Yogyakarta	488,83	13,10
Jawa Timur	4.638,53	11,85
Banten	657,74	5,36
Bali	174,94	4,15
Nusa Tenggara Barat	786,58	16,02
Nusa Tenggara Timur	1.150,08	22,01
Kalimantan Barat	390,32	8,00
Kalimantan Tengah	137,46	5,36
Kalimantan Selatan	184,16	4,52
Kalimantan Timur	211,24	6,00
Kalimantan Utara	47,03	6,99
Sulawesi Utara	200,35	8,20
Sulawesi Tengah	413,15	14,09
Sulawesi Selatan	796,81	9,24
Sulawesi Tenggara	327,29	12,77
Gorontalo	203,69	17,63
Sulawesi Barat	146,90	11,19
Maluku	331,79	19,26
Maluku Utara	76,40	6,41
Papua Barat	223,60	24,88
Papua	914,87	28,40

Sumber: www.bps.go.id

Berbagai program dan kebijakan yang telah dibuat pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT), penanggulangan dalam mengatasi dampak krisis ekonomi, Beras Miskin (Raskin), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan sebagainya sampai saat ini belum mampu mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Semua terjadi disebabkan karena program menitikberatkan pada salah satu dimensi dari gejala kemiskinan yang tidak menyentuh sampai akar penyebab kemiskinan, misalnya Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang kurang efektif karena banyak yang salah sasaran, bahkan membuka peluang penyalahgunaan dana hingga berakibat konflik sosial di beberapa wilayah (Jundi, 2014).

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2007-2015

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Tingkat Kemiskinan (%)
2007	5.457,9	13,55
2008	5.249,5	12,74
2009	4.852,6	11,58
2010	4.716,8	11,27
2011	4.650,9	10,57
2012	4.430,2	9,88
2013	4.375,2	9,61
2014	4.239,0	9,18
2015	4.435,7	9,53

Sumber: www.jabar-bps.go.id

Tabel 1.2 tercatat jumlah penduduk miskin di Jawa Barat cenderung mengalami penurunan pada periode tahun 2007-2015. Pada tahun 2007, jumlah penduduk miskin di Jawa Barat sebanyak 5.457.900 jiwa dengan

tingkat kemiskinan sebesar 13,55%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2015 mencapai 4.435.700 jiwa dengan tingkat kemiskinan sebesar 9,53%. Menurunnya tingkat kemiskinan di Jawa Barat tahun 2007-2015 diikuti juga dengan menurunnya jumlah penduduk miskin di Jawa Barat tahun 2007-2015.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia (Sudiharta: 2014; Susanti: 2013; Riva: 2014), yaitu:

- Produk Domestik Regional Bruto perkapita berupa Produk Domestik Regional Bruto perkapita pada level daerah;
- Pendidikan berupa Rata-Rata Lama Sekolah pada level daerah;
- Upah berupa Upah Minimum Kabupaten pada level daerah; dan
- Pengangguran berupa Tingkat Pengangguran Terbuka pada level daerah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu diidentifikasi masalah kemiskinan yang terjadi di Provinsi Jawa Barat. Kadangkala tingkat kemiskinan antar daerah berbeda-beda, baik dalam hal faktor-faktor yang mempengaruhi atau bisa juga perbedaan dalam hal besarnya pengaruh dari masing-masing faktor tersebut. Perbedaan inilah yang harusnya menjadi perhatian pemerintah dalam menetapkan sasaran pembangunan.

Dengan diketahuinya faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Jawa Barat, maka strategi pembangunan yang dilakukan baik oleh pemerintah dapat mengurangi kemiskinan dengan lebih tepat, efektif, dan efisien.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengaruh PDRB perkapita terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Barat periode 2007-2015?
- 2) Bagaimana pengaruh Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Barat periode 2007-2015?
- 3) Bagaimana pengaruh Upah Minimum Kabupateb terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Barat periode 2007-2015?
- 4) Bagaimana pengaruh Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Barat periode 2007-2015?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Mengetahui bagaimana pengaruh PDRB perkapita terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Barat periode 2007-2015.
- 2) Mengetahui bagaimana pengaruh Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan periode di Jawa Barat 2007-2015.
- 3) Mengetahui bagaimana pengaruh Upah Minimum Kabupaten terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Barat periode 2007-2015.
- 4) Mengetahui bagaimana pengaruh Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Barat periode 2007-2015.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberi kontribusi bagi:

1. Pengambil kebijakan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna di dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang perlu dipacu untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada.
2. Masyarakat umum, diharapkan penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan ekonomi, khususnya ekonomi pembangunan. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yaitu dapat melengkapi kajian mengenai tingkat kemiskinan dengan mengungkap secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3. Mahasiswa, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang faktor pengaruh serta perbedaan tingkat kemiskinan di Jawa Barat, serta sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan kemiskinan di Jawa Barat.

E. Metode Penelitian

E.1 Alat dan Model Analisis

Dalam penelitian ini digunakan alat analisis regresi dengan model ekonometri sebagai berikut:

$$P_{it} = \beta_0 + \beta_1 Y_{it} + \beta_2 EDUC_{it} + \beta_3 W_{it} + \beta_4 UNEMP_{it} + \beta_5 INF_{it} + e_{it}$$

Di mana:

β_0	: Konstanta
P_{it}	: Tingkat Kemiskinan (%)
Y_{it}	: PDRB perkapita (Rupiah)
$EDUC_{it}$: Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)
W_{it}	: Upah Minimum Regional (Rupiah)
$UNEMP_{it}$: Tingkat Pengangguran (%)
INF_{it}	: Tingkat Inflasi (%)
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$: Koefisien regresi
e_{it}	: <i>Error term</i>

E.2 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yang meliputi rentang pengamatan 2007-2015, dan 25 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Data yang meliputi variabel Tingkat Kemiskinan, PDRB perkapita, Tingkat Pendidikan, Upah Minimum Kabupaten, dan Tingkat Pengangguran akan diperoleh dari Biro Pusat Statistik (BPS), serta instansi terkait lainnya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini, yaitu:

1. BAB I PENDAHULUAN, bab ini membahas tentang latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.
2. BAB II TELAAH PUSTAKA, bab ini membahas tentang landasan teori penelitian dan bahasan hasil-hasil penelitian

terdahulu, kerangka pemikiran penelitian, serta hipotesis penelitian.

3. BAB III METODE PENELITIAN, bab ini membahas tentang variabel dan definisi operasional penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisis.
4. BAB IV HASIL DAN ANALISIS, bab ini membahas tentang deskripsi objek penelitian, analisis data dalam penelitian, serta interpretasi hasil penelitian.
5. BAB V PENUTUP, bab ini membahas tentang simpulan penelitian dan saran oleh peneliti kepada pihak-pihak tertentu.